P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

# PENGARUH KOMPETENSI, SPI DAN SAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PALI

**Hilaria Prima Andika Putri[1)] , Sopiyan AR[2)], dan Periansya[3)*]**
*Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang; hilariaprima@yahoo.com*
*Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang;sopiyan1963@gmail.com*
*Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang; periansya@polsri.ac.id,*
**Correspondent Author*

***ABSTRACT***

*This research was conducted with the aim to know the influence of Competencies of Human Resources, SPI, and SAP on The Quality of Financial Statements of The Pali District Government. The population in question is all employees working in OPD Pali District. The sample used is as much as 117 respondents by using purposive sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of the data process through SPSS version 22. The result of this study shows that R2 is 37,8%. The result of this study show that Competencies of Human Resources does not affect the Quality of Financial Statements, SPI has a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements, and SAP has a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements. Simultaneously the independent variables together have an influence on the Quality of Financial Statements.*

***Keywords : Human Resources, Internal Control System, Accounting Standards, Quality of Financial Statements***

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkembangan akuntansi sektor publik semakin banyak digunakan seiring otonomi daerah termasuk globalisasi juga turut menjadi pemicu yang mana saat ini disetiap daerah untuk membangun dan menata pemerintahannya dengan baik (*good governance).* Laporan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dari baiknya tata kelola pemerintahan daerah tersebut. Laporan keuangan daerah harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Suatu laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan baik apabila kualitas laporan keuangannya baik pula (sesuai karakteristik dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah).

Kualitas laporan keuangan dapat ditentukan dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu sistem yang digunakan untuk mencegah adanya kecurangan, yaitu Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan serta bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi serta melihat keandalan data akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan berkualitas disusun berdasarkan standar yang berlaku. Standar dan sistem akuntansi perlu diterapkan secara konsisten agar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan penilaian berupa Opini atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat empat opini yang diberikan olehh BPK yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Jika suatu daerah mendapatkan opini WTP, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki laporan keuangan yang berkualitas.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan meruapakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Ide pembentukan Kabupaten Pali dilandasi beberapa faktor seperti perkembangan pembangunan Kabupaten Muara Enim dan adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat yang memandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam, kemampuan ekonomi, serta kemampuan sumber daya manusia di daerah Pali juga menjadi faktor penting pendorong ide pemekaran.

Data hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pali sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1**
**Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Pali**

| Tahun Anggaran | Opini BPK |
|---|---|
| 2014 | TMP (Tidak Memberikan Pendapat) |
| 2015 | WDP (Wajar Dengan Pengecualian) |
| 2016 | WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) |
| 2017 | WDP (Wajar Dengan Pengecualian) |

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pali dari tahun awal pemekaran yaitu tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada tahun 2014 Kabupaten Pali mendapatkan opini TMP, lalu pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP, dan kemudian pada tahun 2016 Kabupaten Pali mendapatkan opini WTP. Terlihat peningkatan opini yang diberikan oleh BPK Kepada Kabupaten Pali dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Pali. Namun pada tahun 2017 Kabupaten Pali mendapatkan opini WDP dari BPK. Hal ini merupakan penurunan dari kualitas laporan keuangan.

Penempatan atau promosi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan harus sesuai dengan kompetensi jabatan yang diisyaratkan dalam jabatan tersebut. Mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang seharusnya dilakukan dalam suatu organisasi dalam rangka penyegaran dan bentuk penghargaan bagi aparatur yang memiliki kompetensi sehingga aparatur akan lebih terpacu untuk lebih professional dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 2017 terdapat fakta dilapangan dan dari pemberitaan diberbagai media ternyata masih banyak instantsi pemerintah, Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menempatkan dan mempromosikan pejabat tidak mengacu pada kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Akibatnya di beberapa daerah, termasuk di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan muncul permasalahan serius (https://palembang.tribunnews.com/2017/06/28/uji-kompetensi-dan-promosi-jabatan-pns).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Pali pada tahun anggaran 2017 terdapat beberapa hal perlu menjadi perhatian, yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya riviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah belum dilakukan secara memadai, pengelolaan Kas Daerah belum dilaksanakan secara tertib, dan pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran belum tertib dan terdapat pinjaman yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, misalnya bukti pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada lima OPD tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp. 687.981.911,62, dan perjalanan dinas pada tujuh OPD tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 2.138.773.089,00.

Kompetensi (Sukmaningrum, 2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (Wirawan, 2015:18) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dalam organisasinya.

Sistem Pengendalian Internal (Arens, 2014) terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah

mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk mendeteksi adanya kecurangan dan berguna sebagai pengawas, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Maka dapat dikatakan standar akuntansi pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kompetensi SDM, SPI, dan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)". Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Kabupaten Pali dengan objek penelitian seluruh OPD di Kabupaten Pali.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sumber Daya Manusia (Wirawan, 2015: 18) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Kompetensi (Sukmaningrum, 2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan serta bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi serta melihat keandalan data akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kinerja dan akuntabilitas suatu daerah dapat diketahui berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan pada daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki laporan keuangan yang baik, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kinerja dan akuntabilitas yang baik pula. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat berdasarkan karakteristik kualitatif yang terdapat dalam PP No. 71 tahun 2010.

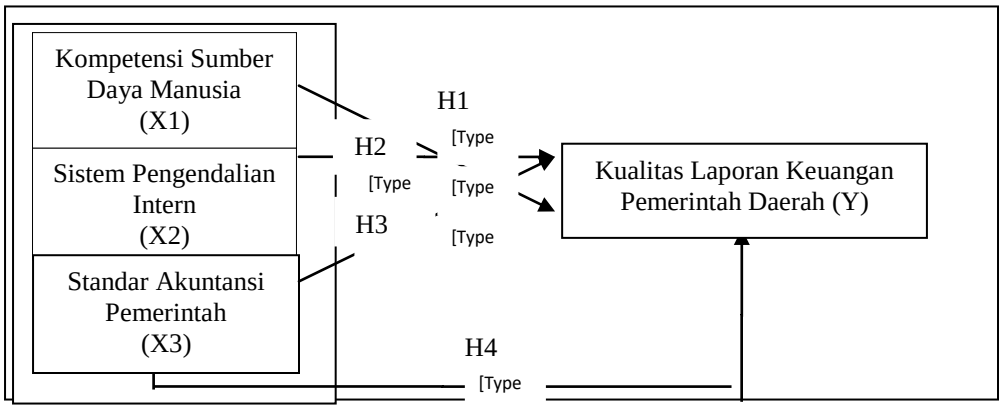


Sumber : Data yang diolah, 2019

**Gamba[illegible]**
**Kerangka Pe[illegible]n**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.

H2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.

H3 : Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.

H4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan data bersifat kuantitatif/statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner secara langsung pada seluruh pegawai keuangan di OPD Kabupaten Pali.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh OPD di Kabupaten Pali (31 OPD) dengan jumlah pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Pali. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel melalui metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini yaitu responden merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari bendahara, kabid keuangan, dan staf-staf keuangan yang bekerja di setiap OPD Kabupaten Pali. Setiap OPD disebarkan 5 kuesioner untuk 5 responden, sehingga total responden berjumlah 155 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Gambaran organisasi perangkat daerah digunakan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan responden terhadap kuesioner yang disebar. Objek penelitian yang dipilih peneliti adalah seluruh OPD di Kabupaten Pali. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Pali, yang berjumlah 1.462 orang. Responden dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari bendahara, kabid keuangan, dan staf-staf keuangan yang bekerja pada setiap OPD di Kabupaten Pali. Setiap OPD (31 OPD) disebarkan 5 kuesioner untuk 5 responden, sehingga total responden berjumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang. Kuesioner yang disebar kepada masing-masing OPD setelah dikumpulkan, hanya kembali sebanyak 117 (seratus tujuh belas) eksemplar. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya beberapa pegawai OPD Kabupaten Pali sedang dalam perjalanan dinas sehingga tidak dapat melakukan pengisian kuesioner. Sehingga tingkat pengembalian kuesioner yaitu sebesar 75%.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean, sum, standar deviasi, variance, range* dan lain-lain, dan untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran skewness dan kurtosis.

Berdasarkan Tabel 2 hasil statistik deskriptif dapat diperoleh nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi, serta rasio Skewness dan rasio Kurtosis sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM memiliki nilai rata-rata sebesar 24,68. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 30, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 16, standar deviasi sebesar 2,612. Nilai rasio Skewness dihitung dengan perhitungan Skewness / standar error of Skewness atau -0,243/0,224 = -1,084 dan Nilai rasio Kurtosis dihitung dengan perhitungan Kurtosis / standar error of Kurtosis atau 1,259/0,444 = 2,835. Dari nilai rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis maka dapat dikatakan bahwa distribusi data tersebut normal, karena kriteria distribusi data normal yaitu jika rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis antara -2 sampai 2.

**Tabel 2**
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**
**Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Skewness | | Kurtosis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Std. Error |
| SDM | 117 | 16 | 30 | 24,68 | 2,612 | -,243 | ,224 | 1,259 | ,444 |
| SPI | 117 | 30 | 50 | 42,38 | 3,746 | ,036 | ,224 | ,937 | ,444 |
| SAP | 117 | 32 | 55 | 45,84 | 4,102 | ,632 | ,224 | 1,094 | ,444 |
| LKPD | 117 | 26 | 40 | 34,01 | 3,180 | ,557 | ,224 | -,240 | ,444 |
| Valid N (listwise) | 117 | | | | | | | | |

Sumber: data primer yang diolah, 2019

2. SPI memiliki nilai rata-rata sebesar 42,38. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 50, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 30, standar deviasi sebesar 3,746. Nilai rasio Skewness dihitung dengan perhitungan Skewness / standar error of Skewness atau 0,036/0,224 = 0,160 dan Nilai rasio Kurtosis dihitung dengan perhitungan Kurtosis / standar error of Kurtosis atau 0,937/0,444 = 2,110. Dari nilai rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis maka dapat dikatakan bahwa distribusi data tersebut normal, karena kriteria distribusi data normal yaitu jika rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis antara -2 sampai 2.
3. SAP memiliki nilai rata-rata sebesar 45,84. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 55, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 32, standar deviasi sebesar 4,102. Nilai rasio Skewness dihitung dengan perhitungan Skewness / standar error of Skewness atau 0,632/0,224 = 2,821 dan Nilai rasio Kurtosis dihitung dengan perhitungan Kurtosis / standar error of Kurtosis atau 1,094/0,444 = 2,463. Dari nilai rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis maka dapat dikatakan bahwa distribusi data tersebut normal, karena kriteria distribusi data normal yaitu jika rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis antara -2 sampai 2.
4. Kualitas LKPD memiliki nilai rata-rata sebesar 34,01. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 40, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 26, standar deviasi sebesar 3,180. Nilai rasio Skewness dihitung dengan perhitungan Skewness / standar error of Skewness atau 0,557/0,224 = 2,486 dan Nilai rasio Kurtosis dihitung dengan perhitungan Kurtosis / standar error of Kurtosis atau -0,240/0,444 = -0,540. Dari nilai rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis maka dapat dikatakan bahwa distribusi data tersebut normal, karena kriteria distribusi data normal yaitu jika rasio Swekness dan nilai rasio Kurtosis antara -2 sampai 2.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data berdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini menggunakan metode grafik dan metode uji statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal *P-P Plot of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, nilai residual tersebut telah normal. Metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

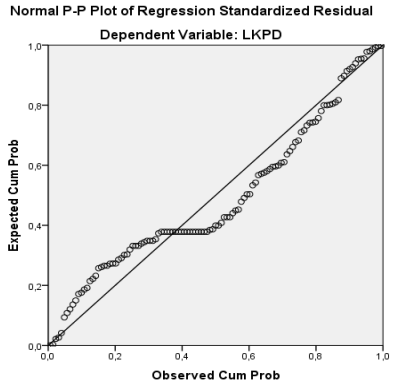


Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

**Gambar 2; Hasil Uji Normalitas Grafik**

Dari Gambar 2 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut normal sehingga data tersebut dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Dari Tabel 3 di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,065. Karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,065 > 0,05), maka data tersebut telah normal sehingga data tersebut dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

**Tabel 3**
**Hasil Uji Normalitas**
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 117 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,50808437 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,121 |
| | Positive | ,121 |
| | Negative | -,109 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,309 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,065 |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

**Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak boleh terdapat korelasi antar tiap variabel bebas. Model regresi yang baik tidak boleh terdapat korelasi antar tiap variabel bebas.

**Tabel 4**
**Hasil Uji Multikolonieritas**
**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 10,551 | 3,060 | | 3,448 | ,001 | | |
| | SDM | -,203 | ,115 | -,167 | -1,761 | ,081 | ,616 | 1,624 |
| | SPI | ,319 | ,078 | ,376 | 4,097 | ,000 | ,654 | 1,530 |
| | SAP | ,326 | ,077 | ,420 | 4,225 | ,000 | ,556 | 1,797 |

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* ketiga variabel lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas atau dengan kata lain tidak adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas pada model regresi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilihat dengan grafik plot (*scatterplot*) di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sedangkan jika penyebaran titik membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas.

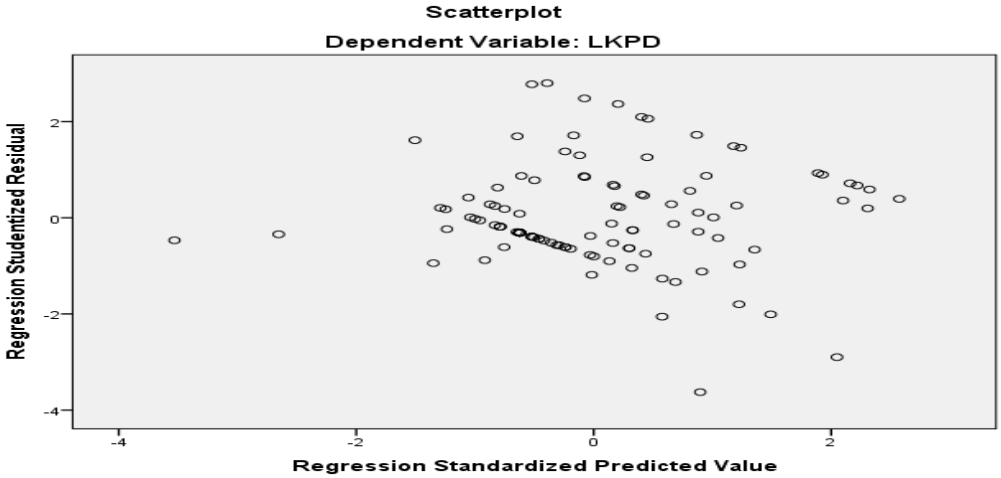


Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

**Gambar 3 ; Grafik Plot Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari Gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau dengan kata lain tidak terjadi kesamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda antara Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 5**
**Koefisien Regresi**
**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10,551 | 3,060 | | 3,448 | ,001 |
| | SDM | -,203 | ,115 | -,167 | -1,761 | ,081 |
| | SPI | ,319 | ,078 | ,376 | 4,097 | ,000 |
| | SAP | ,326 | ,077 | ,420 | 4,225 | ,000 |

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 5 diatas, diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 10{,}551 - 0{,}203\ X_1 + 0{,}319\ X_2 + 0{,}326\ X_3 + e}$$

Persamaan regresi ini dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 10,551 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu Kompetensi SDM, SPI, dan SAP nilainya 0 maka Kualitas LKPD sebesar 10,551 atau 10,551 %.
2. Koefisien regresi variabel Kompetensi SDM sebesar -0,203 nilai yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Kompetensi SDM dengan variabel Kualitas LKPD yang artinya jika nilai variabel Kompetensi SDM naik sebesar 1 maka nilai Kualitas LKPD akan turun sebesar 0,203%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
3. Koefisien regresi variabel SPI sebesar 0,319 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel SPI dengan variabel Kualitas LKPD yang artinya jika nilai variabel SPI naik sebesar 1 maka nilai Kualitas LKPD akan naik sebesar 0,319%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
4. Koefisien regresi variabel SAP sebesar 0,326 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel SAP dengan variabel Kualitas LKPD yang artinya jika nilai variabel SAP naik sebesar 1 maka nilai Kualitas LKPD akan naik sebesar 0,326%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

**Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)**

**Tabel 6**
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)**
**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,615[a] | ,378 | ,361 | 2,541 |

a. Predictors: (Constant), SAP, SPI, SDM
b. Dependent Variable: LKPD
Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa hasil pengujian regresi berganda diperoleh koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,615 atau sebesar 61,5%, dan nilai $R^2$ sebesar 0,378. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Kompetesi SDM, SPI, dan SAP adalah sebesar 37,8%. Sedangkan sisanya sebesar 62,2% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,361. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel Kompetensi SDM, SPI, dan SAP adalah sebesar 36,1%. Sedangkan sisanya sebesar 63,9% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan.

**Uji Hipotesis**
**Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)**

Pengujian secara parsial (Uji-t) terhadap masing-masing variabel independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil output regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t hitung dan signifikansinya.

Signifikansi tiap variabel, dapat dilihat dari nilai t-hitung dan t-tabel setiap variabel X. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel X secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y.

**Tabel 7**
**Hasil Uji Signifikansi Parsial**
**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10,551 | 3,060 | | 3,448 | ,001 |
| | SDM | -,203 | ,115 | -,167 | -1,761 | ,081 |
| | SPI | ,319 | ,078 | ,376 | 4,097 | ,000 |
| | SAP | ,326 | ,077 | ,420 | 4,225 | ,000 |

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan, masing-masing adalah:

1. Pengujian Hipotesis 1 (Kompetensi SDM)
   Dari *output* SPSS didapat $t_{hitung}$ sebesar -1,761. Untuk menentukan $t_{tabel}$ dapat dicari pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 117-3-1 = 113 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk $t_{tabel}$ sebesar 1,981/-1,981 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai $t_{tabel} < t_{hitung}$ (-1,981 < -1,761) maka H1 ditolak.
   Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H1 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H1 ditolak. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 (0,081 > 0,05) maka H1 ditolak. Jadi dapat diperoleh nilai $t_{hitung}$ sebesar -1,761 dengan nilai signifikansi 0,081, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kualitas LKPD.
2. Pengujian Hipotesis 2 (SPI)
   Dari *output* SPSS didapat $t_{hitung}$ sebesar 4,097. Untuk menentukan $t_{tabel}$ dapat dicari pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 117-3-1 = 113 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk $t_{tabel}$ sebesar 1,981/-1,981 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,097 > 1,981) maka H2 diterima.
   Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka H2 diterima, dan jika signifikansi > 0,05 maka H2 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H2 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai $t_{hitung}$ sebesar 4,097 dengan nilai signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa SPI secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD.
3. Pengujian Hipotesis 3 (SAP)
   Dari *output* SPSS didapat $t_{hitung}$ sebesar 4,225. Untuk menentukan $t_{tabel}$ dapat dicari pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 117-3-1 = 113 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk $t_{tabel}$ sebesar 1,981/-1,981 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,225 > 1,981) maka H3 diterima.
   Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka H3 diterima, dan jika signifikansi > 0,05 maka H3 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H3 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai $t_{hitung}$ sebesar 4,225 dengan nilai signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD.

**Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)**

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika taraf signifikansi < 0,05 dan $F_{hitung}$ lebih > dari $F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 8**
**Hasil Uji Signifikansi Simultan**
**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 443,295 | 3 | 147,765 | 22,883 | ,000[b] |
| | Residual | 729,697 | 113 | 6,457 | | |
| | Total | 1172,991 | 116 | | | |

a. Dependent Variable: LKPD
b. Predictors: (Constant), SAP, SPI, SDM
Sumber: Output pengolahan data dari SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji F dapat diketahui $F_{hitung}$ sebesar 22,883. Untuk menentukan $F_{tabel}$, dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,000 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 2 (n-k-1) atau 117-3-1 = 113 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk $F_{tabel}$ sebesar 2,685 (lihat pada tabel statistik). Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ (22,883 > 2,685) maka H4 diterima.

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka H4 diterima, dan jika signifikan > 0,05 maka H4 ditolak. Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H4 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai $F_{hitung}$ sebesar 22,883 dengan nilai signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM, SPI, dan SAP secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD.

**Pembahasan**

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan nilai negatif, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. Hal ini didasarkan juga pada hasil pengujian hipotesis, nilai $t_{hitung}$ untuk variabel Kompetensi SDM adalah sebesar -1,761 jika dibandingkan dengan nilai $t_{tabel}$ adalah -1,981 dan nilai signifikansi 0,081 > 0,05. Maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. Hal ini berarti bahwa H1 ditolak.

Berdasarkan hasil analisis kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,361. Nilai ini berarti bahwa sebesar 36,1% variabel mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali dipengaruhi oleh Kompetensi SDM dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil pengujian statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden untuk variabel Kompetensi SDM dengan nilai yang rendah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia pada seluruh OPD Kabupaten Pali belum cukup memadai. Dari hasil deskripsi responden berdasarkan latar belakang pendidikan menunjukkan bahwa dalam lingkup OPD Kabupaten Pali, pegawai keuangan didominasi oleh tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan diluar bidang akuntansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada seluruh OPD Kabupaten Pali, sebagian besar kurang paham mengenai peraturan yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, kurang mampu dalam menyusun laporan keuangan, dan kurang aktifnya dalam mengikuti pelatihan (berdasarkan jawaban kuesioner responden).

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dari baiknya tata kelola pemerintahan daerah tersebut. Kualitas laporan keuangan dapat ditentukan dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia saja, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang

dimilikinya. Menurut Pujanira (2017), kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyusun laporan keuangan harus memiliki pengetahuan yang luas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki ketrampilan yang bagus, sikap yang baik dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas (Wulandari, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan Daerah.

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. Hal ini didasarkan juga pada hasil pengujian hipotesis, nilai $t_{hitung}$ untuk variabel SPI adalah sebesar 4,097 jika dibandingkan dengan nilai $t_{tabel}$ adalah 1,981 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat dilihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. Hal ini berarti bahwa H2 diterima.

Berdasarkan hasil analisis kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,361. Nilai ini berarti bahwa sebesar 36,1% variabel mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali dipengaruhi oleh SPI dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil pengujian statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden untuk variabel SPI dengan nilai yang cukup tinggi. Artinya dalam lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi sudah cukup baik diterapkan, namun harus tetap ditingkatkan lagi.

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu sistem yang digunakan untuk mencegah adanya kecurangan. Sistem Pengendalian Intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan serta bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi serta melihat keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan (Maksyur, 2015). Melalui sistem pengendalian internal yang baik juga akan mengurangi resiko adanya kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga mampu menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik juga harus sejalan dengan bagian-bagian dan fungsi-fungsi terkait yang dapat berintegrasi dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sehingga sistem yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik pula (Agung dan Gayatri, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maksyur (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Gayatri (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. Hal ini didasarkan juga pada

hasil pengujian hipotesis, nilai $t_{hitung}$ untuk variabel SAP adalah sebesar 4,225 jika dibandingkan dengan nilai $t_{tabel}$ adalah 1,981 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat dilihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. Hal ini berarti bahwa H3 diterima.

Berdasarkan hasil analisis kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,361. Nilai ini berarti bahwa sebesar 36,1% variabel mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali dipengaruhi oleh SAP dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil pengujian statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden untuk variabel SAP dengan nilai yang paling tinggi. Artinya prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar yang berlaku sudah diterapkan dengan baik, namun harus tetap ditingkatkan lagi.

Dalam menyusun laporan keuangan, diharapkan berpedoman dan sesuai dengan standar yang berlaku dan telah ditetapkan. Standar dan sistem akuntansi perlu diterapkan secara konsisten agar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014), standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai $f_{hitung}$ untuk variabel SAP adalah sebesar 22,883 jika dibandingkan dengan nilai $f_{tabel}$ adalah 2,685 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat dilihat $f_{hitung} > f_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi SDM, SPI, dan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. Hal ini berarti bahwa H4 diterima.

Pemerintah di setiap daerah berlomba-lomba agar terwujudnya pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Pemerintahan dengan tata kelola yang baik dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan daerah tersebut setiap tahunnya. Menurut Wati, Nyoman, dan Sinarwati (2014) sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, juga diperlukan suatu sistem pengendalian yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan. Menurut Maksyur (2015) dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit. Agar laporan keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara lengkap dan tepat waktu, maka diperlukan suatu standar. Standar akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Maksyur (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lalu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Pali.
2. SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Pali.
3. SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Pali.
4. Kompetensi SDM, SPI, dan SAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Pali.

### Saran Managerial

Adapun saran managerial yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu mendapatkan kembali semua kueisoner yang telah disebar ke berbagai OPD, sehingga dapat lebih memperkuat pengaruhnya.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel independen lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, maupun Komitmen Organisasi.
3. Pegawai keuangan yang bekerja pada OPD Kabupaten Pali yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan di OPD Kabupaten Pali karena telah melalui proses akademis dalam pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan. Dan juga jika pegawai keuangan yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi bisa melalui berbagai pelatihan terlebih dahulu untuk lebih memahami serta dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
4. Pemerintah Kabupaten Pali diharapkan selalu memperbaiki Sistem Pengendalian Intern yang telah diterapkan sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
5. Pemerintah Kabupaten Pali diharapkan selalu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Agung, Tut Madiguna, dan Gayatri. 2018. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 23. No. 2. ISSN: 1253-1276.

Arens, A.A, Elder R.J, dan Beasley, M.S. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kelima Belas Jilid 1. Alih Bahasa: Herman Wibowo dan Tim Perti. 2014 Jakarta: Erlangga.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.* Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2017*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). 2018. Statistik Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2018. https://palikab.bps.go.id/publication/2018/09/28/213ae52195ac45673303d0c1/statistik-daerah-kabupaten-penukal-abab-lematang-ilir-2018.html, diunduh pada 22 Juli 2019.

Faishol, Ahmad. (2016). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)". *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. I. No. 3. ISSN: 2502 – 3764.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanifa, Lia, Andi Basru Wawo, dan Husin. 2016. "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1. No. 2. e-ISSN: 2502-5171.

Hartono, Jogiyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.

Hartono, Jogiyanto. 2015. *Teori Portfolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ihsanti, Emilda. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota).

Lasmara, Freddie, dan Sri Rahayu. 2016. "Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 3. No. 4. ISSN: 2338-4603.

Maksyur, Noprial Valenra. 2015. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *JOM. FEKON*. Vol. 2. No. 2.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Prabangsari, Anissa Putri. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Badan dan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri).

Priyatno, Duwi. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.

Priyatno, Duwi. 2018. *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: Andi

Pujanira, Putriasri. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY". *Jurnal Nominal*. Vol. 2. No. 2.

Rahayu, Liza, Kennedy Kennedy, dan Yuneita Anisma. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)". *JOM FEKON*. Vol. 1. No.2.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

_____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

_____. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian & Pengembangan*. Cetakan ke 4. Bandung: Alfabeta.

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)".

Sutrisno, Edy. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Suwanda, Dadang. 2015. "Factors Affecting Quality Of Local Government Financial Statements To Get Unqualified Opinion (WTP) Of Audit Board Of The Republic Of Indonesia (BPK)". *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 6. No. 4. ISSN 2222-2847.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 2. No. 1.

Wijayanti, Ratna. 2017. "Pengaruh Kompetensi SDM Dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6. No. 3. ISSN 2460-0585.

Wirawan. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wulandari, Mayang. 2014. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)".